



# Pengaruh IMF (International Monetary Fund) Dalam Pengambilan Kebijakan Ekonomi- Politik Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Baru (1967-1974)

<sup>1</sup> Dewita Harthanti, <sup>2</sup>Nuryana

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>1</sup>[dewitaharthanti@gmail.com](mailto:dewitaharthanti@gmail.com), <sup>2</sup>[nuryana@gmail.com](mailto:nuryana@gmail.com)

---

## INFO ARTIKEL

### RiwayatArtikel:

Diterima: 30-04-2018

Disetujui: 30-06-2018

---

### Kata Kunci:

IMF,  
Ekonomi,  
Politik,  
Orde Baru.

---

## ABSTRAK

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan pengaruh IMF (international monetary fund) dalam pengambilan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1974).dan Mendeskripsikan pengaruh IMF (international monetary fund) dalam pengambilan kebijakan politik Indonesia pada masa Orde Baru (1967-1974). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan dengan menggunakan metode historis karena penelitian ini diarahkan untuk meneliti, mengkaji dan menjelaskan peristiwa masa lalu melalui metode sejarah yang bersifat kualitatif. Susunan penelitian menggunakan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan statistik dengan ciri khas tersendiri. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah Ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing membuat negeri ini tergadaikan perekonominya. IMF bisa dikatakan sebagai penghubung antara pemerintah dengan para investor. Pemerintah hanya sebagai fasilitator masuknya para pemodal asing untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik berupa barang maupun jasa. 2). Pengaruh IMF (International Monetary Fund) dalam hal pemotongan subsidi terhadap kebutuhan dasar rakyat (BBM, Listrik, dan Air). Dengan memotong subsidi bagi kehidupan rakyat, maka rakyat akan berontak, atau akan terjadi huru-hara dalam kehidupan sosial masyarakat, kegiatan ekonomi akan macet, produktivitas akan menurun, kegiatan ekspor turun, tidak punya devisa, dan utang luar negerinya tidak akan terbayar dan inilah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. 3). Pengaruh IMF (International Monetary Fund) dalam hal deregulasi dunia usaha. Soeharto juga membawa kembali investasi asing dari luar negeri yang praktis menghilang dibawah pemerintahan Soekarno karena alasan ideologis, ketidakstabilan politik, dan pengelolaan perekonomian yang salah. Secara bijak, Soeharto berkonsentrasi pada pembangunan dalam negeri dan pembangunan ekonomi. Dan ia tidak memiliki banyak pilihan karena keterbatasan Indonesia dihampir semua bidang setelah pertualangan internasional Soekarno. Masyarakat internasional mendukung program-program Soeharto dalam menjadwalkan ulang utang Indonesia di Tokyo. Melalui IGGI ( Inter governmental group on Indonesia).

**Abstract:** This research aims to describe the influence of IMF (International Monetary Fund) in the economic policy of the New Order (1967 – 1974). And describing the influence of IMF (International Monetary Fund) in the Indonesian political policy during the New Order (1967-1974). The research methods used in this study are qualitative research with the study of literature using historical methods because the research is aimed at researching, reviewing and explaining past events through Qualitative method of history. The research arrangement uses qualitative research that does not use statistics with its own distinctive characteristics. The results obtained from the research are Indonesia's dependence on foreigners to make the country is the economy. The IMF can be said to be a liaison between governments and investors. The Government is only the facilitator in the entry of foreign investors to exploit the natural wealth in Indonesia, both in the form of goods and services. 2). Influence of IMF (International Monetary Fund) in the case of withholding subsidies to the basic needs of the people (BBM, electricity, and water). By cutting subsidies for people's lives, the people will be guided, or there will be riots in the social life of the community, economic activities will be jammed, productivity will decline, export activities down, no foreign exchange, and debt outside His country would not have

---

*paid off and this was the case during the New Order administration. 3). Influence of IMF (International Monetary Fund) in terms of deregulation of the business world. Suharto also brought back foreign investments from abroad that practically disappeared under Sukarno's rule for ideological reasons, political instability, and incorrect economic management. Wisely, Suharto concentrated on domestic development and economic development. And it does not have much choice because Indonesia's limitations are almost all fields after the international adventure of Sukarno. The international community supported Suharto's programmes in rescheduling Indonesia's debts in Tokyo. Through IGGI (Inter governmental Group on Indonesia).*

---



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

---

## A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki konstitusi sejak disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 yang disebut dengan undang-undang dasar 1945 atau disingkat UUD' 45. Secara garis besar dalam undang-undang dasar 1945 tercantum mengenai prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

Pasal-pasal yang tertera dalam undang-undang dasar 1945 diantaranya mengatur mengenai hak asasi manusia, agama, pendidikan, keamanan negara dan mengenai ekonomi. Pasal mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 33, terdapat 3 ayat prototype dan tambahan 2 ayat yang diamandemen pada tanggal 10 agustus 2002, jadi saat ini pasal 33 memiliki 5 ayat sedangkan sampai akhir masa Orde Baru pasal 33 memiliki 3 ayat. Berikut isi dari pasal 33. (1) Perekonomian disusun berdasarkan usaha-usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal 33 UUD'45, seluruh potensi kekayaan alam, yang ada di Indonesia ini dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hanya negara yang berwenang mengatur, mengelola, memproduksi dan mengurus seluruh potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Semenjak disahkan Undang-Undang penanaman modal asing (UU PMA) No.1 pada tahun 1967 tentang investasi asing ini, maka menjadi pelegalan bagi para investor asing untuk menanamkan saham-sahamnya dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari Indonesia. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebar-lebarnya. Kebijakan ekonomi Soeharto ini dapat menyebabkan Indonesia terikat pada kekuatan modal asing (Wismulyani dkk, 2009:80).

Negara Indonesia pada masa Pemerintahan Orde Baru tidak bisa terlepas dari konstelasi politik dunia. Sejak awal Soeharto menempatkan komunisme sebagai musuh. Oleh karena itu, pola kebijakan politik luar negerinya condong kearah barat. Bahkan, tim ekonomi yang merekonstruksi perekonomian kita dikenal dengan "Mafia Berkeley". Kebijakan yang mereka bawa banyak dipengaruhi oleh ideologi kaum kapitalisme yang dibawah oleh IMF (Wismulyani dkk, 2009:78).

Pengaruh IMF telah mendominasi Indonesia karena mampu membangun kekuasaan ekonomi dan politik Rezim Orde Baru untuk tujuan ekspansi modal kaum kapitalis asing. IMF menjual konsep pembangunan ekonomi dan politik yang ditopang oleh utang. Eksistensi IMF di Indonesia merupakan salah satu persyaratan utama pemulihan ekonomi dan politik. Ideologi IMF adalah imperialisme kolektif yaitu menjajah negara-negara sedang berkembang secara bersama-sama melalui pasar bebas. Hubungan Indonesia - IMF satu arah, IMF pihak yang dominan dan Indonesia pihak yang didominasi (Prawironegoro, 2010:100).

IMF merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang berdiri pada akhir tahun 1945 tersebut baru mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947 dengan bertumpu pada 100 orang staf yang direkrut dari 15 negara. Pengalaman Indonesia sebagai anggota IMF memiliki keunikan tersendiri. Indonesia, yang menjadi anggota IMF ke-56 pada tahun 1954, pada akhirnya, mengalami “ periode keluar-masuk keanggotaan” pada tahun 1965 dan 1967. Dalam hal perolehan bantuan, Indonesia memiliki pengalaman pula memperoleh bantuan dari IMF selama enam tahun berturut-turut, yaitu dalam bentuk stand-by arrangement yang berlangsung dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1974 (Harinowo, 2004:7).

Pengalaman Indonesia selama tiga tahun terakhir kontrak bantuan tersebut dilakukan Indonesia tanpa penarikan dana sama sekali, meskipun Indonesia justru memanfaatkan program yang dirancang bersama dengan IMF. Barangkali, pengalaman inilah yang akhirnya membawa pemerintah Indonesia untuk mengikat kembali kontrak bantuan dari IMF (Harinowo, 2004:7).

IMF merupakan lembaga atau institusi yang paling berkuasa yang telah berhasil menegakan agenda “pasar bebas” dari korporasi-korporasi itu. Dengan memberikan pinjaman ratusan miliar dollar kepada kaum elit dunia ketiga, IMF telah melakukan pengendalian signifikan terhadap strategi ekonomi dan politik kebanyakan negara. Merekapun telah memaksakan seperangkat kebijakan (“structural adjustment”) dan suatu model ekonomi dan politik yang sangat menguntungkan kaum minoritas, namun sangat mencelakakan kaum mayoritas (Danaher, 2005:12).

Berbagai malapetaka terjadi sebagai akibat dari sejumlah kebijakan IMF tersebut, namun kaum elit dunia ketiga tetap “setia” menjalankannya. Pasalnya, mereka terlanjur terjebak dalam pusaran (treadmill) hutang. Jika kaum elit Dunia Ketiga mau menerapkan sejumlah kebijakan yang ramah terhadap korporasi, maka merekapun akan mendapat lebih banyak uang. Namun, jika mereka lebih berpihak kepada kepentingan rakyat mereka sendiri ketimbang para manager korporasi transnasional (Danaher, 2005:15)

Negara-negara peminjam itu akan terisolasi dari pasar-pasar modal internasional apabila negara-negara tersebut lebih memperhatikan rakyatnya daripada para korporasi. Oleh karena jebakan hutang itulah, negara-negara miskin terus-menerus berupaya mendapatkan kucuran hutang yang lebih banyak dan menerapkan berbagai kebijakan yang berpusat pada ekspor ke pasar dunia, yang justru hanya menguntungkan korporasi-korporasi raksasa belaka (Danaher, 2005:15).

Kebijakan investasi asing itu ditandai dengan penjualan kekayaan alam Indonesia secara murah kepada pengusaha asing, ini dilakukan sebagai kompensasi dari bantuan hutang luar negeri Indonesia. Sementara itu, utang luar negeri kemudian menjadi alat tekanan negara donor yang semakin menjerat Indonesia. Akibat jebakan utang ini Indonesiapun harus patuh terhadap instruksi IMF (Wismulyani dkk 2009:78-79).

Berdasarkan hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih mendalam mengenai judul tentang pengaruh IMF (International Monetary Fund) dalam pengambilan kebijakan ekonomi-politik Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1974).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan dengan menggunakan metode historis karena penelitian ini diarahkan untuk meneliti, mengkaji dan menjelaskan peristiwa masa lalu melalui metode sejarah yang bersifat kualitatif. Susunan penelitian menggunakan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan statistik dengan ciri khas tersendiri.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh IMF (International Monetary Fund) dalam pengambilan Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Baru (1967-1974)**

IMF mendominasi dan mempengaruhi Indonesia bukan lewat senjata militernya seperti terjadi pada masa kolonialisme (masa penjajahan) akan tetapi IMF mendominasi ataupun mempengaruhi Indonesia lewat imperialisme globalisasi yaitu penjajahan dalam bentuk baru yaitu berupa

jebakan hutang luar negeri yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia resmi bergabung kembali dengan IMF (International monetary fund) pada tanggal 23 februari 1967, dengan adanya bergabung kembali antara Indonesia dengan IMF itu untuk mengikat kembali hubungan kontrak bantuan antara IMF dengan Indonesia yaitu pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1974 dalam bentuk *stand-by arrangement*. Yang berjangka waktu 34 bulan. Ini berarti pencairan dana bantuan tersebut berjalan selama jangka waktu pinjaman tersebut, dengan cara setiap kali (setiap tiga bulan sekali) dilakukan *review* dan pencairan cicilan dan dana lainnya. Seperti halnya dengan Indonesia, yang meminjamkan dana kepada IMF. Menurut peneliti, dengan adanya mengikat kembali kontrak bantuan tersebut, maka Indonesia terjebak utang luar negeri dan terperangkap dalam pengaruh-pengaruh IMF terhadap setiap kebijakan-kebijakan ekonomi Orde Baru.

Didalam pengaruh IMF (International monetary fund), terhadap setiap pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru sangat kuat, dikarenakan IMF mempunyai peranan penting terhadap pengambilan keputusan setiap kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru dan Orde baru wajib mematuhi setiap perintah ataupun keputusan yang harus diambil atas intruksi ataupun persyaratan-persyaratan yang harus dijalankan dari IMF walaupun itu bertentangan dengan ideologi, konstitusi yang berlaku di Indonesia bahkan termaksud merugikan rakyatnya sendiri demi IMF. Akibat jebakan utang itu, maka Indonesia sangat bergantung kepada IMF (International monetary fund). Hal ini juga didukung oleh sebuah teori *depedensi* (ketergantungan) yang telah dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut (Miriam, 2013:90) Secara garis besar, teori *Dependensi* adalah suatu keadaan dimana keputusan-keputusan utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi di negara berkembang seperti

keputusan mengenai harga komoditi, pola investasi, hubungan moneter, dibuat oleh individu atau institusi di luar negara yang bersangkutan. Pada umumnya memberikan gambaran melalui analisis dialektesis yaitu suatu analisis yang menganggap bahwa gejala-gejala sosial yang dapat diamati sehari-hari pasti mempunyai penyebab tertentu.

Teori ini menjadi titik tolak penyuaian ekonomi terbelakang pada sistem dunia, sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya penyerahan sumber penghasilan daerah ke pusat, sehingga mengakibatkan perekonomian daerah menjadi terbelakang.

Sedangkan pendapat dari Raul Prebisch adalah negara-negara dibagi atas negara maju (industri) dan terbelakang (pertanian), yang saling berdagang. Ada negara "pusat" dan negara "pinggiran". Hubungan pusat dan pinggiran tak seimbang, tidak saling menguntungkan untuk melakukan eksploitasi secara sepihak.

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori *depedensi* adalah sebuah teori ketergantungan yang dimana keputusan-keputusan utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi bagi negara berkembang seperti harga komoditi, pola investasi dan hubungan moneter dibuat oleh institusi ataupun lembaga diluar negara yang bersangkutan, seperti negara-negara maju yang saling mengikat kontrak dalam hal berdagang namun diantara kedua negara tersebut tidak seimbang dan kecenderungan dari salah satu negara seperti negara maju tersebut untuk melakukan eksploitasi secara sepihak akibat jebakan hutang yang dilakukan oleh negara berkembang. Dan inilah yang terjadi antara Indonesia dengan IMF.

Menurut peneliti, akibat jebakan utang itu, maka pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru itu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dari dan IMF (international monetary fund) menekan habis-habisan pemerintah Orde Baru untuk mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang harus diikuti oleh Orde Baru secara sepihak, adapun persyaratan-persyaratan yang harus diikuti oleh Orde Baru terhadap intruksi dari IMF

(International Monetary Fund) salah satunya adalah privatisasi BUMN, yang dimana BUMN ini adalah sebuah aset yang paling berharga oleh Indonesia yang harus dilindungi karena BUMN ini merupakan sebuah badan pemerintah yang berwenang untuk mengola kebutuhan barang maupun jasa bagi kebutuhan dasar masyarakat.

BUMN juga dalam kehidupan perekonomian memiliki peranan yang luar biasa manfaatnya, dimana peranannya sebagai pengelola kebutuhan hajat hidup orang banyak, dari mulai keperluan kebutuhan bahan pokok, hingga kebutuhan jasa masyarakat, perspektif ekonomi makro memandang BUMN memiliki pengaruh dalam aspek kepentingan fiskal, yaitu untuk menambah sumber anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Perlu kita ketahui bahwa APBN itu merupakan salah satunya anggaran pendapatan belanja negara untuk mengelola ataupun mengalokasikan dana sekaian banyak untuk dialokasikan bagi kebutuhah hajat hidup orang banyak termaksud untuk mengalokasikan dana untuk sekolah, rumah sakit, dana pensiunan dan kebutuhan masyarakat lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan IMF menginginkan dengan adanya privatisasi BUMN itu maka pemerintah Indonesia untuk mengurangi dana untuk biaya sekolah, rumah sakit dan dana untuk pensiun dan menyangkut kebutuhan hidup masyarakat lainnya.

menurut peneliti, IMF melakukan privatisasi BUMN karena sudah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, jadi dalam bentuk apapun kegiatan ekonomin dan investasinya di negara debitur maka menjadi legal leh para pemodal asing karena sudah dilindungi oleh undang-undang penanaman modal asing pada tahun 1967 yaitu merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak antara IMF dan Indonesia.

Pada masa pemerintahan Orde Baru merupakan langkah awal untuk membuka jalan ataupun peluang bagi privatisasi BUMN dengan undang-undang penanaman modal asing dan jebakan hutang luar negeri itu, apapun bentuk kegiatan investasinya maka IMF menekan pemerintahan Orde Baru untuk mengikuti semua persyaratan dari IMF untuk pemerintahan

selanjutnya seperti B.J Habibi, Abdul Rahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi privatisasi BUMN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967-1974, kegiatan privatisasinya masih dalam pengawasan pemerintah dikarenakan masih baru bergabung kembali IMF dengan Indonesia.

Adapun Privatisasi BUMN yang telah diprivatisasi atas usulan IMF (international monetary fund) adalah PDAM, Pertamina, PLN, Tambang Batu Bara, PT Tambang Timah, Semen Gresik, Indosat, Krakatau steel, dan BUMN lainnya.

Ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing membuat negeri ini tergadaikan perekonominya. IMF bisa dikatakan sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan para investor asing. Pemerintah hanya sebagai fasilitator bagi masuknya para pemodal asing untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia dengan semurah-murahnya, baik berupa barang maupun jasa.

Melunasi hutang kepada IMF itu tidaklah mudah, bahkan seringkali pemerintah membayar hutang dengan berhutang lagi karena harus membayar cicilan ditambah lagi bunganya yang menumpuk tiap tahun ditambah lagi IMF menekan Indonesia untuk melakukan devaluasi mata uang supaya Indonesia tidak mampu membayar hutang di IMF. Hutang Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru itu, yaitu pada tahun 1968 sampai pada tahun 1974 hutang kepada IMF (intermationalmonetary fund) dalam bentuk Stand-by Arragement. Efeknya adalah para kreditor menjadi leluasa untuk menyetir ataupun menekan kebijakan pemerintah Indonesia, salah satunya adalah privatisasi BUMN.

Privatisasi sangat merugikan negara, karena pengelolaan usaha dilakukan oleh swasta dan keuntungannya untuk swasta makanya terjadi swastanisasi sehingga harga jual ditentukan oleh swasta. Privatisasi ini bisa menyebabkan kehilangan kedaulatan ekonominya. Berdasarkan tekanan dari IMF untuk melakukan privatisasi BUMN ini dilakukan oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan Orde Baru telah melakukan privatisasi BUMN, namun masih dalam rambu-rambu pengawasan pemerintah, sehingga tidak terlalu dibebaskan para investor untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, Orde Baru

merupakan era dimana untuk pembuka privatisasi karena rezim ini tidak menekankan privatisasi sebagai prioritas utamanya dalam hal kebijakan ekonominya.

Indonesia memiliki sejarah perekonomian yang dipengaruhi oleh IMF dalam hal privatisasi BUMN dan menjadi ketergantungan kepada bantuan dana asing lainnya lewat lembaga keuangan internasional yang dinamakan IMF.

menurut peneliti, maka akan terjadinya krisis Indonesia yang berkepanjangan dan Indonesia semakin bergantung kepada IMF, karena salah satu tujuan dari IMF untuk menyuruh Indonesia untuk melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN adalah agar para kapitalis asing bisa menguasai saham-saham yang ada di aset negara tersebut yaitu BUMN dan agar Kaum kapitalis itu juga bisa leluasa keluar masuk tanpa halangan bagi masuknya kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa atas nama pihak asing yang melakukan kegiatan ekonominya di Indonesia dengan mudah seperti itu yang telah di gambarkan oleh kedua tokoh imperialisme besar dunia yaitu F.D. Roosevelt presiden Amerika Serikat dan Winston Churchill perdana menteri Inggris membuat gagasan baru dalam menjajah kembali negara-negara bekas jajahannya yaitu menjajah bukan secara militer akan tetapi secara ekonomi dalam perjanjian Atlantik atau Atlantic Charter. Yang isi pokoknya adalah mereka bebas berlayar ke negara mana saja tanpa rintangan, bebas berdagang, bebas memperoleh bahan mentah. Amerika dan Inggris memiliki armada laut yang hebat dilengkapi dengan teknologi-teknologi canggih maka dari itu mereka ingin menguasai dunia secara ekonomi

Hakikatnya perjanjian Atlantik itu adalah menjajah dan membagi dunia menjadi "milik" Amerika Serikat dan Inggris. Dan sebelum perang dunia berakhir, Amerika Serikat dan Inggris bersekutu untuk membuat badan keuangan dunia internasional yang disebut dengan IMF (International Monetary Fund) di Bretton Woods, New Hampshire, Juli 1944 oleh kaum kapitalis asing yang tujuannya adalah kerjasama moneter internasional, stabilisasi kurs, menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca pembayaran, meningkatkan mobilitas

dana antar negara, dan mewujudkan perdagangan bebas.

Para pemilik modal asing adalah modalnya milik kelompok negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Perancis, Italia, Jerman perusahaan-perusahaan besar atau Multi National Corporation atau MNC dan modal asing milik perusahaan-perusahaan negara bekas penjajah, mereka bebas beroperasi diseluruh dunia dengan menggunakan kekuatan intelligence yang dikenal dengan central of intelligence (CIA) milik Amerika Serikat dan MI-6 di Indonesia intelligence milik Inggris

Modal asing mengubah dirinya menjadi kekuatan pembangunan di seluruh dunia melalui berbagai bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh IMF ( International Monetary Fund). Karena lembaga keuangan tersebut merupakan alat modal asing untuk mengembangkan diri. Menurut peneliti, memang tidaklah mudah untuk menghilangkan pengaruh IMF dari Indonesia, dan membayar hutang juga tidaklah mudah akan tetapi setidaknya kita menyadari bahwa IMF itu merupakan tameng ataupun alat dari Negara-negara kapitalis yang tergabung dalam (Grup 7) untuk menguras dan mengeksploitasi bahan mentah dari Indonesia dengan semurah-murahnya dan mencari kuli murah untuk dijadikan komparador bagi mereka selama mereka para kapitalis asing itu melakukan kegiatan investasi ekonominya di Indonesia.

Menurut peneliti juga, privatisasi BUMN ini sangat merugikan negara dan masyarakat pada umumnya karena BUMN ini merupakan sebuah badan yang mengelola kebutuhan barang maupun jasa bagi masyarakat dan menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak. Dikuasai, diprivatisasi demi keuntungan kaum kapitalis asing. Ironisnya, akibat jebakan hutang pada masa pemerintahan Orde Baru itu, pemerintah telah menggadaikan perusahaan milik negara lainnya demi bisa membayar hutang lagi yang telah jatuh tempo padatahun 1973.

Disamping privatisasi BUMN, IMF juga menyuruh Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru itu untuk melakukan pemotongan ataupun mengurangi kebutuhan dasar rakyat,

berupa BBM, Listrik, air dan lain-lain, dengan mengurangi subsidi bagi kebutuhan dasar rakyat itu maka akan terjadi kerusuhan-kerusuhan didalam kehidupan masyarakat, maka rakyat akan marah, berontak sekaligus akan berdemonstrasi secara besar-besaran demi untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Perlu kita ketahui bahwa Minyak merupakan segalanya dalam kehidupan ekonomi manusia. Dengan minyak kita mampu membangun, karena dengan sumbangan minyak, tabungan pemerintah dapat terbentuk. Melalui minyak pula stabilisasi ekonomi atau pengendalian inflasi dapat dilakukan baik langsung atau tidak langsung dari subsidi minyak. Dengan minyak sebagai sumber penerimaan utama, anggaran belanja berimbang dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Struktur ekonomi juga bisa dimantapkan pada tahun 1968. Minyak merupakan fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah, meskipun industri lain yang memerlukan modal intensif dan teknologi tinggi serta menghasilkan mineral dan karet juga berkembang pesat. Pengeboran lepas pantai dimulai pada tahun 1966 dan berkembang pesat pada tahun 1968. Pada bulan Agustus 1968.

Produksi minyak tumbuh sekitar 15% pada tahun 1968-9 dan hampir 20% pada tahun 1970. Kenaikan harga minyak antara bulan November 1973 dan Juni 1974 meningkatkan penerimaan devisa bagi Indonesia lebih dari dua kali lipat, karena sebagian besar peningkatan tersebut (sesudah adanya negosiasi kembali pembagian keuntungan dengan perusahaan-perusahaan minyak) dengan sendirinya menambah penerimaan pemerintah Indonesia, sehingga penghasilan pemerintah juga naik hampir dua kali lipat.

Ditambah lagi banyak para investor asing untuk melakukan penanaman modal ataupun investasinya ke Indonesia dalam deregulasi dunia usahanya seperti jepang dan Amerika Serikat pada awal-awal masa pemerintahannya Orde Baru.

Walaupun pada awalnya lebih banyak berkonsentrasi ke persoalan dalam negeri, Soeharto kemudian memulai membuka ekonomi Indonesia melalui ASEAN. Ia mengikuti strategi

pembangunan ekonomi Asia Timur: membuka pasar, membangun industri ringan, pertumbuhan yang mengandalkan ekspor, dan mengundang investor asing.

Namun, apakah daya Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru itu telah terlanjur dan terjebak hutang di IMF yang mengharuskan Indonesia untuk taat dan patuh terhadap semua persyaratan yang dikeluarkan oleh IMF walaupun itu merugikan negara bahkan merugikan masyarakat seluruhnya. Akibat jebakan utang itu juga IMF berserta negara yang tergabung dalam (grup7) seperti Jepang dan Amerika bebas melakukan kegiatan investasi ataupun deregulasi dunia usaha di Indonesia.

## **2. Pengaruh IMF (International Monetary Fund) dalam pengambilan Kebijakan Politik Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Baru (1967-1974)**

IMF mempengaruhi ataupun mengintervensi para elit politik Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru itu melegalkan undang-undang tentang penanaman modal asing (UU PMA) pada tahun 1967 dan undang-undang penanaman modal dalam negeri (UUPMDN) pada tahun 1968. Dan lahirnya undang-undang tentang PMA ini merupakan hasil konferensi di Jenewa tentang investasi asing di Indonesia yang diselenggarakan pada bulan November pada tahun 1966. Konferensi ini dihadiri oleh para ekonom Indonesia yang disebut "The Berkeley Mafia" dan para kapitalis global yang memimpin perusahaan raksasa, seperti David Rockefeller, dan perusahaan dunia diwakili oleh British Leyland, Lehman Brothers, Asia Development Bank, dan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, hal yang wajar apabila undang-undang penanaman modal asing ini yang disahkan dua bulan setelah pertemuan ini memiliki karakteristik pro terhadap investasi asing.

Untuk melancarkan kegiatan privatisasi, deregulasi dunia usaha, devaluasi mata uangnya di Indonesia, maka IMF terlebih dahulu mengusulkan ataupun mengintervensi para elit politik Orde Baru yang tergabung dalam "mafia berkeley" untuk melegalkan undang-undang penanaman modal asing tersebut. Agar supaya kegiatan investasinya di Indonesia tidak

terhambat ataupun bertentangan dengan konstitusi-konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Orde Baru juga diberikan kebebasan dan pengeluaran dana yang begitu besar bagi keperluan ABRI, sehingga dengan adanya diberikannya bantuan Cuma-Cuma oleh IMF kepada Indonesia dalam hal pengeluaran untuk militernya secara besar-besaran sehingga akhirnya, para militer banyak yang melakukan kegiatan korupsi misalnya Ibnu Sutowo.

Soeharto menugaskan kepada Ibnu Sutowo untuk mengelola Pertamina yang kemudian menjadi Pertamina peran bisnis tentara semakin kokoh ketika perusahaan minyak Pertamina (didirikan pada tahun 1961) dan Permina digabung menjadi Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara). Pertamina dimanfaatkan sebagai kerajaan pribadi oleh Ibnu Suwoto, yang segera memperoleh reputasi internasional berkat manajemennya yang agresif dan penuh visi. Reputasi yang kemudian runtuh pada tahun 1975. Pertamina hanya sedikit melakukan pengeboran sendiri, selebihnya perusahaan ini (dan bukan pemerintah) mengadakan perjanjian pembagian produksi dengan perusahaan asing. Pemerintah Soeharto memberikan kuasa monopoli penuh dalam urusan minyak. Ibnu Adalah seorang jenderal senior asal Sumatera selatan yang terlibat dalam kasus "barter" di pelabuhan Tanjung Priok ketika ia menjabat sebagai wakil panglima AD urusan logistik. Ia ditugaskan untuk mengambil kembali dan merehabilitasi sumur minyak di Sumatera timur yang ditinggalkan oleh Belanda ketika perusahaan minyaknya dinasionalisasi pada tahun 1957.

Soeharto percaya terhadap Ibnu, dan sebagai imbalannya ia mendapatkan dana untuk membiayai angkatan bersenjata. Ini penting bagi Soeharto, karena negara dalam keadaan bangkrut ketika ia mulai berkuasa pada tahun 1967. Ibnu mendapatkan peluang besar bersama Pertamina ketika terjadi embargo minyak oleh organisasi Negara pengekspor minyak (OPEC) pada tahun 1973. Namun, Ibnu teledor dan eksekutif dalam investasinya.

Pertamina adalah satu-satunya perusahaan negara yang paling berhasil karena kenaikan empat kali lipat harga minyak dipasaran dunia. Karena keberhasilannya tersebut, Ibnu mulai bergerak dalam bisnis real estate, perumahan, baja, perusahaan teknologi tinggi, dan juga tanker. Ia tidak pernah melapor ke Soeharto tentang kegiatan investasi yang mahal dan khusus, terutama dalam hal tanker, sehingga utang Pertamina mencapai 10 miliar dollar AS pada tahun 1974 sampai pada tahun 1976.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Pengaruh IMF dalam pengambilan kebijakan ekonomi dapat dilihat dari 3 (tiga) sector, yaitu: pertama, pengaruh IMF (International Monetary Fund) dalam hal Privatisasi BUMN. Adapun Privatisasi BUMN yang telah diprivatisasi atas usulan IMF (International Monetary Fund) adalah PDAM, Pertamina, PLN, Tambang Batu Bara, PT Tambang Timah, Semen Gresik, Indosat, Krakatau steel, dan BUMN lainnya. Ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing membuat negeri ini tergadaikan perekonominya. IMF bisa dikatakan sebagai penghubung antara pemerintah dengan para investor. Pemerintah hanya sebagai fasilitator masuknya para pemodal asing untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik berupa barang maupun jasa.

Kedua, pengaruh IMF (International Monetary Fund) dalam hal pemotongan subsidi terhadap kebutuhan dasar rakyat (BBM, Listrik, dan Air). Dengan memotong subsidi bagi kehidupan rakyat, maka rakyat akan berontak, atau akan terjadi huru-hara dalam kehidupan sosial masyarakat, kegiatan ekonomi akan macet, produktivitas akan menurun, kegiatan ekspor turun, tidak punya devisa, dan utang luar negerinya tidak akan terbayar dan inilah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru.

Ketiga, pengaruh IMF (International Monetary Fund) dalam hal deregulasi dunia usaha. Soeharto juga membawa kembali investasi asing dari luar negeri yang praktis menghilang dibawah pemerintahan Soekarno karena alasan ideologis, ketidakstabilan politik, dan pengelolaan perekonomian yang salah. Secara bijak, Soeharto berkonsentrasi pada pembangunan dalam negeri dan pembangunan ekonomi. Dan ia tidak memiliki



banyak pilihan karena keterbatasan Indonesia dihampir semua bidang setelah pertualangan internasional Soekarno. Masyarakat internasional mendukung program-program Soeharto dalam menjadwalkan ulang utang Indonesia di Tokyo. Melalui IGGI (Inter governmental group on Indonesia).

Sedangkan dalam pengambilan Kebijakan Politik Indonesia, IMF (international monetary fund) mengintervensi ataupun mempengaruhi para elit politik Indonesia yang tergabung dalam "mafia berkeley" untuk melegalkan undang-undang penanaman modal asing (UU PMA) pada tanggal 10 Januari 1967 dan undang-undang penanaman modal dalam negeri (UU PMDN) pada tahun 1968. Untuk melancarkan kegiatan para investor asing di Indonesia. 2). Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan dana yang begitu besar bagi ABRI atas instruksi IMF agar nantinya para militer itu dapat melindungi dan mengayomi ataupun setia sama IMF ketimbang rakyat mereka sendiri. Dengan adanya banyak pengeluaran pemerintah dalam hal pengeluaran dana bagi militer itu sehingga dengan mudahnya mereka melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## REFERENSI

- [1] Alesina A., David Dollar. (2000). *Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?*. Journal of Economic Growth, vol.5, no.1 (March), pp 33-63.
- [2] AM, Hanafi. (1998). *Menggugat Kudeta Jendral Soeharto*. Lele France: Monblance.
- [3] Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Brannen, Julian. (1996). *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Damanhuri, Didin S. (2014). *Ekonomi-Politik Indonesia dan Antarbangsa*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- [7] Danaher, Kevin. (2005). *10 Alasan Bubarkan IMF dan Bank dunia*. Jakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- [8] Harinowo, Cyrillus. (2002). *Utang pemerintah; Perkembangan, prospek dan pengelolaannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [9] Hariowo, Cyrillus. (2004). *IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- [10] Harsutejo. (2003). *Sejarah yang Digelapkan*. Jakarta: Hasta Mitra.
- [11] Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- [12] Kaelan, M.S. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner dalam bidang sosial, agama, Budaya, Filsafat dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.